

PENGARUH PDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013-2022

Dhea Putri Pratama¹, Ira Grania Mustika²,
Angga Permadi Karpriana³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi

^{1,2,3} Universitas Tanjungpura, Indonesia

b1031211018@student.untan.ac.id¹,

Ira.grania.m@ekonomi.untan.ac.id²,

angga.permadi.k@ekonomi.untan.ac.id³

Received: August 10, 2024. **Revised:** September 1, 2024. **Accepted:** September 4, 2024. **Issue Period:** Vol.8 No.4 (2024), Pp. 720-732

Abstrak: Pendapatan Asli Daerah dianggap sebagai segala sesuatu yang diterima atau yang diperoleh daerah untuk memperoleh pendapatan melalui punggutan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan undang-undang. Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk membeli aset yang dapat digunakan lebih dari setahun dan digunakan untuk memperkaya daerah. Kinerja yang dilakukan pemerintah merupakan hasil pengukuran nilai terhadap perencanaan kerja dalam mencapai hasil akhir dari program pemerintah daerah. Kinerja keuangan dinilai menggunakan rasio keuangan berdasarkan APBD. Tulisan ini ditujukan agar peneliti mendapat ilmu tentang apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal mampu mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013-2022. Peneliti melakukan analisis kuantitatif dan data sekunder. Uji analisis deskriptif, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, analisis regresi linear berganda, uji t, dan uji koefisien determinasi dengan memakai aplikasi SPSS 26 sebagai teknik pengujian yang akan dilakukan. Penelitian ini menghasilkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak secara parsial tidak berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah

Abstract: Local Revenue is considered as everything that is received or obtained by the region to obtain revenue through taxation based on local regulations in accordance with the law. Capital Expenditure is an expenditure to purchase assets that can be used for more than a year and used to enrich the region. The performance of the government is the result of measuring the value of work planning in achieving the final results of local government programs. Financial performance is assessed using financial ratios based on the APBD. This paper is intended so that researchers gain knowledge about whether Regional Original Revenue (PAD) and Capital Expenditure are able to influence the Financial Performance of Local Governments in 2013-2022. Researchers conducted quantitative analysis and secondary data. Descriptive analysis test, normality test, multicollinearity test,



DOI: 10.52362/jisamar.v8i4.1609

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

heteroscedasticity test, autocorrelation test, multiple linear regression analysis, t test, and coefficient of determination test using the SPSS 26 application as a testing technique to be carried out. This study found that the Financial Performance of Pontianak City Regional Government partially had no effect on Regional Original Revenue (PAD) and Capital Expenditure.

Keywords: Local Revenue, Capital Expenditure, Government Financial Performance

I. PENDAHULUAN

Pemerintah pusat memerintahkan pemerintah daerah agar mengendalikan dan mengawasi wilayah masing-masing. Tujuan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah untuk menjamin bahwa setiap daerah dapat membangun sistem pemerintahan mayoritas, nilai-nilai, dan kesetaraan, memperkuat kekuatan lokal, membangun kesempatan kerja dan kemampuan pembangunan yang demokratis dan demokratis, serta menjaga hubungan baik dalam pemerintahan pusat maupun daerah. Kinerja keuangan suatu daerah menunjukkan seberapa efektif dan efisien daerah itu mematuhi peraturan pelaksanaan keuangan; menjaga layanan dan memenuhi standar atas penilaian dengan sebaik mungkin adalah syarat bagi entitas luar untuk mempertimbangkan investasi di daerah. Rasio keuangan berdasarkan APBD dianggap sebagai alat ukur untuk menilai keuangan suatu pemerintahan. Pemerintah Daerah Kota Pontianak yang memiliki kuasa dari pemerintah pusat demi mengelola dan menjalankan ekonomi daerahnya sendiri sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 terkait pemerintah daerah (PEMDA) dalam urusan regulasi dan administrasi. Mereka melaksanakan tanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di daerahnya masing-masing dengan mengacu pada ketentuan yang diberikan pemerintah pusat. Otonomi daerah di Kota Pontianak bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan, pelayanan publik yang berkualitas, dan partisipasi aktif kepada masyarakat dalam mengambil keputusan.

Menurut [1] meningkatnya penerimaan daerah yang signifikan setiap tahun juga menandakan sumber daya keuangan daerah yang besar. Efektivitas pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah berdampak langsung pada kinerjanya. [2] lebih lanjut menjelaskan dimana belanja modal direalisasikan sebagai anggaran agar dapat menyejahterakan masyarakat. Pemerintah daerah melakukan kegiatan belanja modal sebagai upaya investasi. Namun perlu diperhatikan bahwa aktivitas tersebut tidak dilakukan dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Hasil Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, [3] dalam penelitiannya menemukan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil ini membuktikan bahwa keterpurukan masyarakat akan keadaan sosial seperti contohnya pandemi bukan suatu halangan untuk PEMDA dalam pertumbuhan daerah. Ditemukan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang negatif signifikan pada pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah dikarenakan pemerintah belum sepenuhnya dapat berkontribusi dan dana seharusnya digunakan untuk belanja modal dialihkan untuk membantu mencukupi kebutuhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan [11] dan [9].

Dengan memperhatikan permasalahan di atas, penulis ingin melihat bagaimana pengaruh PAD dan belanja modal pada investasi jangka panjang dalam aset fisik atau non-fisik yang dapat meningkatkan kapasitas atau efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak dari tahun 2013-2022 dan melihat apakah PAD dan belanja modal mampu mempengaruhi kinerja keuangan PEMDA Kota Pontianak dalam mengelola keuangan dan kemandirian pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah demi terlaksananya kemajuan kinerja yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada bidang keuangan.

II. KAJIAN LITERATUR

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut [4] menyatakan keagenan sebagai suatu hubungan individu (pemimpin) meminta individu mengambil alih tugas dan mengambil keputusan. Teori keagenan memandang pemerintah daerah sebagai agen, bertindak sebagai prinsipal yang mewakili kepentingan masyarakat. Teori ini berasumsi bahwa



DOI: 10.52362/jisamar.v8i4.1609

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

pemerintah daerah cenderung bertindak demi kepentingannya sendiri dan tidak selalu bisa diandalkan untuk bertindak demi kepentingan masyarakat. Terjadi ketimpangan informasi antara subjek (pemerintah) yang memperoleh informasi secara langsung dan subjek (masyarakat).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan adalah istilah yang tepat dalam menggambarkan posisi keuangan organisasi pada waktu tertentu. Pengukuran dilakukan dengan metrik seperti kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas bisnis untuk memenuhi tujuan, sasaran, visi, dan misi pemerintah daerah dalam hal penggunaan, pengelolaan, dan pelaksanaan operasinya. Kinerja pemerintah daerah tergolong efisien jika rasio perolehan pendapatannya < 1 atau $< 100\%$. Jika rasio efisiensi semakin kecil maka semakin baik kinerja pemerintah daerah [12]. Untuk menghitung rasio efisiensi menurut [13] adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Pendapatan Asli Daerah (X1)

Pendapatan Asli Daerah adalah komponen penting dari pengakuan teritorial yang kemudian berkontribusi pada kemajuan wilayah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota. Pembangunan daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan akan mengimbangi kemampuan daerah untuk menghasilkan PAD. PAD terdiri atas pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, output dari kekayaan yang terpisah, dll. Yang tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Setiap daerah harus mengumpulkan dana sebanyak mungkin untuk inisiatif pembangunan berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan keuangannya sendiri.

Belanja Modal (X2)

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010, belanja modal mengacu pada pengeluaran untuk memperoleh aset dengan pemanfaatan > 1 tahun. Belanja modal dapat mencakup belanja modal untuk tanah, mesin dan peralatan, bangunan dan infrastruktur, jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya. Ketika pemerintah membelanjakan uang lebih banyak daripada yang telah disisihkan untuk kapitalisasi minimum aset tetap atau aset lainnya, maka hal ini disebut sebagai belanja modal. Properti ini tidak dimaksudkan untuk dijual.

Pengaruh X1 Terhadap Y

PAD adalah pemasukan yang dihasilkan oleh daerah yang mengikuti seperangkat aturannya sendiri. Secara bertahap PEMDA akan menanggung bebannya sendiri sebagai hasil dari peningkatan PAD [5]. Hal ini juga dapat membantu pengukuran atas kinerja keuangan PEMDA.

Menurut [5] menyatakan PAD harus lebih ditingkatkan di masa depan agar pendapatan daerah semakin tinggi sehingga mengurangi beban anggaran dari pusat. Temuan penelitian ini sejalan dengan [14] yang menemukan hasil bahwa pendapatan asli daerah berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya terkait pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan, jadi hipotesis awal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak

Pengaruh X2 Terhadap Y



DOI: 10.52362/jisamar.v8i4.1609

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

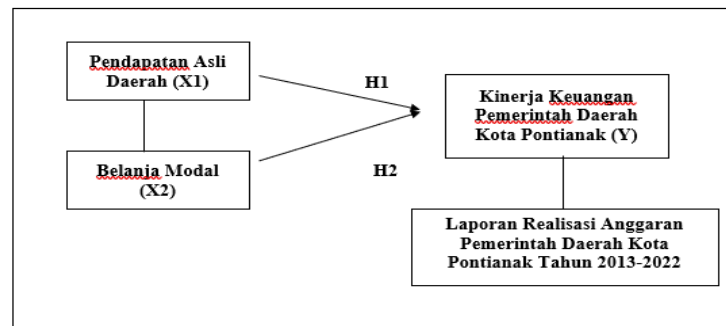
Belanja modal adalah anggaran oleh PEMDA agar manfaat atas aset tetap yang bertahan lebih dari satu tahun. Salah satu belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah adalah pembangunan infrastruktur. Perkembangan ini diyakini akan meningkatkan pendapatan daerah di tahun-tahun mendatang. Keberhasilan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik diindikasikan oleh pertumbuhan pendapatan asli daerah yang lebih tinggi. [6] alokasi peningkatan jumlah uang kepada pemerintah daerah atas pembangunan infrastruktur akan meningkatkan kinerja fiskal. Lebih lanjut, produktivitas masyarakat dapat meningkat dan efisiensi berbagai sektor dapat ditingkatkan dengan adanya infrastruktur yang memadai.

Wahyudin & Hastuti, 2020 memperoleh hasil belanja modal memberi dampak positif pada kinerja keuangan, Sejalan dengan [15]. Jadi, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak

Penelitian juga menggunakan kerangka berpikir sebagai landasan model konseptual dengan menghubungkan teori dan variabel sebagai indikator permasalahan pada penelitian, kemudian menyajikannya dalam bentuk bagan. Berikut ini adalah kerangka konseptual penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Dengan tujuan untuk meneliti lebih mendalam mengenai variabel Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak. Objek Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik *time series* yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan www.djpk.kemenkeu.go.id melalui website resminya.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Khususnya pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak yang membantu Meningkatkan kinerja pemerintah dengan melakukan pengawasan dan pengelolaan anggaran, keuangan serta aset daerah Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Mei 2024. Populasi dalam penelitian ini adalah data realisasi pendapatan asli daerah dan belanja modal di Kota Pontianak dari Tahun 2013-2022. Teknik sampel yang digunakan adalah Teknik *full Sampling* atau sampel jenuh yaitu semua populasi digunakan sebagai sampel. Metode ini dipilih karena subjek hanya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif untuk menyajikan representasi data yang dikumpulkan secara komprehensif dan tepat, memungkinkan kemudahan interpretasi dan pengambilan keputusan yang tepat dengan menguji hipotesis menggunakan uji statistik SPSS 26.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif



DOI: 10.52362/jisamar.v8i4.1609

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Adapun analisa pada statistik deskriptif penggunaannya berfungsi menjelaskan mengenai hasil data dalam penelitian dari perhitungan yang telah dilakukan sehingga menghasilkan uji statistik deskriptif. Data disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Stat. Desc.

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	10	265271762	537797747	403769306.90	85265490.481
X2	10	388559816	490804054	436958648.30	29202001.660
Y	10	.92	1.08	1.0010	.04606
Valid N (listwise)	10				

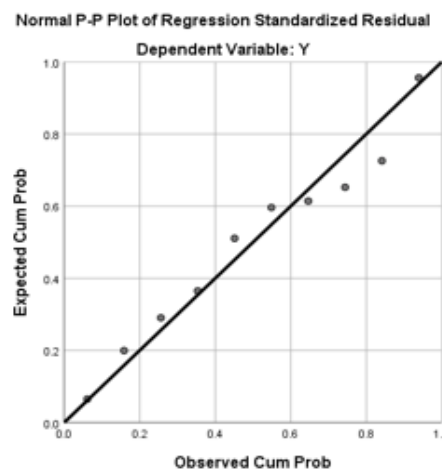
SPSS, 2024

Pengujian pada tabel.1 menunjukkan bahwa X1 memiliki nilai min. (Rp 265.271.762) dan nilai maks. (Rp 537.797.747). Selain itu, ada simpangan baku std. deviasi sebesar 85265490,481 dan mean sebesar Rp 403.769.306,90. Kemudian hasil uji pada variabel Belanja Modal dalam analisis deskriptif nilai terendah (minimum) sebesar Rp 388.559.816 dan nilai tertinggi (maximum) sebesar Rp 490.804.054. Selain itu, ada simpangan baku (std. deviasi) sebesar 29202001,660 dan mean sebesar Rp 436.958.648,30. Selanjutnya pada pengujian variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak tahun 2013-2022 menunjukkan nilai min. (0,92 persen) dan max. (1,08 persen). Selain itu, nilai simpangan baku (std. deviasi) sebesar 0,04606 dan mean sebesar 1.0010.

Uji Asumsi Klasik

1. **Uji Normalitas** : menggunakan plot dan one – sample Kolmogorov – Smirnov. Data dianggap normal jika signifikansi > 0,05 dan sebaliknya. Pengolahan data dapat dilihat pada gambar 2:

Gambar 2. Uji Normalitas Prob. Plot



DOI: 10.52362/jisamar.v8i4.1609

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03668941
Most Extreme Differences	Absolute	.148
	Positive	.148
	Negative	-.112
Test Statistic		.148
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

SPSS, 2024

Gambar.2 Plot memperlihatkan bahwa data tersebar serta seiring dengan garis diagonal maka, model ini normal dan pengujian data akan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* untuk memastikan bahwa data tersebut normal. Nilai signifikansi sebesar $0.200 > 0.05$ menunjukkan bahwa nilai residual berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.

2. **Uji Multikolinieritas** : untuk mengetahui apakah ada korelasi antar variabel bebas (independen) dalam regresi. Jika nilai toleransi lebih besar dari 0,100 dan nilai VIF kurang dari 10,000, maka tidak akan ada bukti multikolinieritas [7]. Berikut ini adalah hasil dari pengolahan data uji multokolinieritas:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	X1	.993	1.007
	X2	.993	1.007

a. Dependent Variable: Y

SPSS, 2024

Menurut Tabel 3, nilai *Tolerance* X1 dan X2 adalah 0.993, yang menunjukkan bahwa $X1 \text{ dan } X2 > 0.10$ ($0.993 > 0.100$), dan $< 10,000$ ($1,007 < 10,000$). Maka data dinyatakan tidak multikolinearitas.

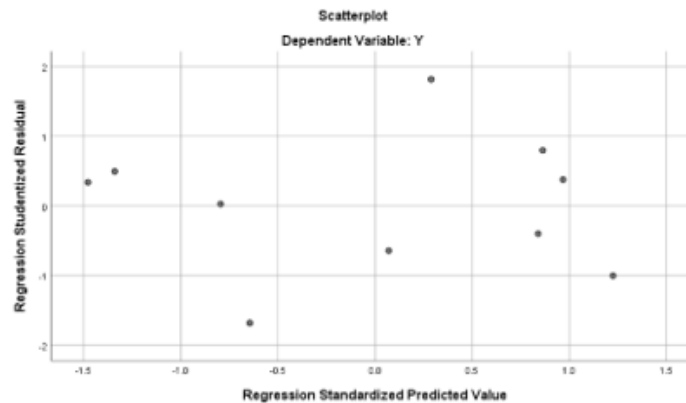
3. **Uji Heterokedastisitas** : Jika terjadi homokedastisitas, model regresi dianggap baik, yang berarti pengujian itu valid. Menurut [16], titik-titik tersebar di sumbu Y di atas dan di bawah angka 0 jika pola gelombang dan menyempit hasil data tidak terlihat. Gambar 3 merupakan hasil Uji.



DOI: 10.52362/jisamar.v8i4.1609

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Gambar 3. Hasil Uji Heterokedastisitas



Gambar 3 menunjukkan bahwa titik-titik tersebar di seluruh sumbu di atas dan di bawah angka 0, dan tidak ada pola yang jelas, yang dikenal sebagai gelombang, melebar, dan menyempit. Selanjutnya, data menunjukkan bahwa regresi ini tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Untuk memastikan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam data maka dilakukan Uji Gleser berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas Gleser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.084	.132	.636	.545
	X1	-1.966E-11	.000	-.073	.851
	X2	-1.120E-10	.000	-.142	.715

a. Dependent Variable: ABRESID

SPSS, 2024

Dijelaskan data tabel.4 signifikasi pada variabel independen, X1 = 0,851 dan X2 sebesar 0,715. Sehingga, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kedua nilai variabel independen ini berada diatas nilai signifikansi sebesar 0,05 dapat dinyatakan data model regresi pada tabel 4 tidak mengalami heteroskedastisitas.

4. **Uji Autokorelasi** : Metode ini sering digunakan pada data model regresi yang bersifat runtun waktu atau time series. Pengujian menggunakan tes *Durbin-Watson*. Hasil pengolahan data menunjukkan model regresi tidak memiliki autokorelasi jika sesuai dengan kriteria $du < DW < 4du$. Dijelaskan pada tabel.5.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.604 ^a	.365	.184	.04160	2.555

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

SPSS, 2024

Uji autokorelasi dilakukan dengan Uji *Durbin-Watson*. Dihasilkan nilai DW-test, sebesar 2,555. Jumlah data penelitian adalah 10, variabel bebas (k) adalah 2, dan level signifikansi penelitian adalah 5%. Tabel DW menghasilkan nilai dL sebesar 0,70, nilai du sebesar 1,64, sehingga nilai $4-dL = 3,30$ dan nilai $4-du = 2,36$. Berdasarkan temuan ini, daerah bebas autokorelasi terletak pada nilai du (1,64) hingga nilai $4-du$ (2,36), dan nilai DW-test sebesar 2,555 terletak pada daerah bebas dari autokorelasi. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tidak menggunakan autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Nilai signifikansi $< 0,05$ dijadikan kriteria untuk mengetahui pengaruh variabel (X) terhadap variabel (Y). Dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap variabel dependen Kinerja Keuangan. Hasil yang diperoleh seperti yang dicantumkan dalam tabel.6:

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.150	1.838		1.714	.130
	X1	-.091	.062	-.439	-1.460	.188
	X2	-.274	.207	-.399	-1.328	.226

SPSS, 2024

Berdasarkan hasil analisis yang ditunjukkan dalam tabel, model persamaan regresi linier berganda berikut dapat dibuat:



DOI: 10.52362/jisamar.v8i4.1609

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 3,150 - 0,091X_1 - 0,274X_2 + e$$

Keterangan :

Y	= Kinerja Keuangan
α	= Konstanta
β	= Koefisien Regresi
X1	= Variabel Independen (PAD)
X2	= Variabel Independen (Belanja Modal)
e	= Error

Dalam Tabel 6 *Unstandardized Coefficients* dengan persamaan $Y = 3,150 - 0,91 \text{ PAD} - 0,274$. Penjelasan dari persamaan tersebut yaitu nilai konstanta adalah 3,150, yang berarti kedua variabel independen, masing-masing memiliki nilai 0 maka pengungkapan kinerja keuangan daerah akan memiliki nilai 3,150. Koefisien regresi X1 adalah -0,091, yang berarti bahwa setiap 1% akan diikuti dengan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar -0,091. Koefisien regresi variabel belanja modal adalah -0,274, yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah akan menurun sebesar 0,274 jika belanja modal meningkat sebesar 1%, dengan asumsi variabel lain tetap.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji T)

Ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing X akan memberi pengaruh yang signifikan pada Y. Apabila nilai $\text{Sig} < 0,05$ dan nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ dapat dikatakan bahwa X mempengaruhi Y. Dapat dilihat pada tabel.7 sbb:

Tabel 7. Hasil Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.150	1.838		1.714	.130
	X1	-.091	.062	-.439	-1.460	.188
	X2	-.274	.207	-.399	-1.328	.226

SPSS, 2024

Tabel.7 memperoleh nilai t hitung X1 sebesar -1,460 dan X2 sebesar -1,328. Pada t tabel jumlah data $n = 10$ dan $(df) = n-k-1$ atau $10-2-1 = 7$ pada tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$. Hasil uji t untuk setiap variabel dijelaskan X1 memiliki nilai t hitung sebesar -1,460, nilai t hitung $< t$ tabel 1,894, dan tingkat nilai signifikansi X1 sebesar $0,188 > 0,05$. Oleh karena itu, dapat dianggap bahwa H_0 diterima dalam penelitian ini dan H_a ditolak. Jadi, PAD tidak berdampak besar pada kinerja keuangan secara parsial. Pada variabel Belanja Modal memiliki



DOI: 10.52362/jisamar.v8i4.1609

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

nilai t hitung -1,328, dengan nilai t hitung $-1,328 < t$ tabel 1,894, dan tingkat nilai signifikansi variabel Belanja Modal 0,226 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dalam penelitian ini dan H_a ditolak. Jadi, kinerja keuangan tidak terpengaruh secara signifikan oleh belanja modal secara parsial.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan agar dapat mengetahui sejauh apa model mampu untuk menjelaskan variabel Y . Angka yang dibutuhkan berkisar antara nol dan satu, dan jika R^2 kecil, variabel X dianggap tidak mampu menjelaskan variabel Y [7]. Dicantumkan pada tabel.8 sbb:

Tabel 8. Hasil Koef. Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.604 ^a	.365	.184	.04160	2.555

SPSS, 2024

a. Predictors: (Constant), X_2 , X_1

b. Dependent Variable: Y

Tabel.8 memberikan ringkasan model. Hasil dari uji ini yaitu nilai R berkisar antara 0 dan 1 dan menunjukkan korelasi antara X terhadap Y ; jika nilai $R > 1$, dianggap kuatnya hubungan antar X dan Y . Dalam penelitian ini, angka R adalah 0,60 4, yang menunjukkan bahwa ada korelasi sebesar 0,604 antara X_1 dan X_2 dengan Y . Maka terlihat bahwa hubungan antara X dan Y kuat. R persegi (R^2) atau persentase sumbangan antara X pada Y , jika hanya dua variabel independen yang digunakan dalam regresi. Nilai R square adalah 0,365, yang menunjukkan X_1 dan X_2 mampu mempengaruhi Y sebesar 36,5%, dan faktor lain sebesar 63,5%.

V. PEMBAHASAN

Pengaruh X_1 Terhadap Y

Hasil analisis uji t untuk Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa t hitung adalah -1,460 dan t tabel adalah 1,894, maka t hitung $< t$ tabel, dan angka signifikansi $0,88 > 0,05$, yang menunjukkan bahwa hipotesis H_0 diterima dan H_a ditolak. Singkatnya, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak 2013-2022 tidak dipengaruhi oleh PAD. Secara teori menurut [8] bahwa PAD, yang terdiri dari semua uang yang masuk ke kas daerah dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri dan digunakan untuk keperluan daerah, dipungut dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, tiap daerah harus melakukan segala upaya untuk mendapatkan pendapatan setinggi mungkin. Dari hasil analisis tersebut sesuai dengan [18] dan [17]. Dengan kata lain, setiap perubahan variabel PAD secara statistik tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Rendahnya pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah oleh pemerintah daerah menghambat kemampuannya dalam meningkatkan kinerja keuangan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan daerah [9] berpendapat bahwa apabila suatu daerah berhasil memanfaatkan pendapatan daerahnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhannya. Kompetensi pemerintah dalam



DOI: 10.52362/jisamar.v8i4.1609

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

menghasilkan peningkatan pendapatan untuk mendanai usahanya sendiri merupakan bukti keberhasilan kinerjanya.

Pengaruh X2 Terhadap Y

Menurut hasil analisis uji t secara parsial, Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2013–2022, dengan nilai t hitung -1,328 dan nilai t tabel 1,894, yang menunjukkan bahwa t hitung kurang dari t tabel dan angka signifikansi 0,226, yang berada di atas 0,05. Secara teori [10] menyatakan Belanja modal adalah pengeluaran yang dimasukkan ke dalam anggaran untuk membeli aset tetap, tanah, peralatan, dan aset tak berwujud. Sejalan dengan [19] dan [20]. Potensi ini harus dimaksimalkan dengan memanfaatkannya berdasarkan tujuan yang tepat. Hal ini akan menghasilkan peningkatan layanan publik dan hasil kinerja keuangan yang lebih baik. Semakin banyak pengeluaran belanja modal pembangunan yang diterima dan nilai manfaatnya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, semakin baik keuangan daerah karena dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

VI. PENUTUP

Kesimpulan

Hasil dari penelitian dan pembahasan tentang pengaruh belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak dari tahun 2013-2022 menghasilkan temuan bahwa Kinerja keuangan tidak terpengaruh secara signifikan oleh Pendapatan Asli Daerah secara parsial. Untuk membuktikan hal ini, dilakukan uji statistik pada uji t, di mana nilai hitung t adalah $-1,460 < 1,894$ tabel t, dengan tingkat signifikansi 0,1888 di atas 0,05. Hal ini bertentangan dengan H1, yang menyatakan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan tidak terpengaruh secara signifikan oleh Belanja Modal. Untuk membuktikan hal ini, uji statistik pada uji t dilakukan. Nilai t hitung adalah $-1,328 < 1,894$ nilai t tabel, dengan tingkat signifikansi 0,266, yang di atas 0,05. Ini bertentangan dengan H2, yang menyatakan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak dipengaruhi oleh Belanja Modal.

Saran

Temuan dan kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa setiap pemerintah daerah diharapkan dapat secara efektif mengelola dan memanfaatkan potensi daerahnya masing-masing, termasuk PAD dan belanja modal, guna mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, integrasi sarana dan prasarana, serta peningkatan pelayanan publik untuk mendukung peningkatan pertumbuhan pendapatan daerah di Kota Pontianak secara berkelanjutan. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas penelitiannya dengan menambah atau mengganti sampel untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan lebih baik. Agar peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi dampak pendapatan daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah, disarankan agar mereka mempertimbangkan untuk memasukkan variabel independen tambahan, seperti dana perimbangan, belanja daerah, dan belanja operasional. Selain itu, implikasi rasio keuangan lainnya harus dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas penelitian ini, yang pada akhirnya mengarah pada temuan baru dan berbeda bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sumawan, W. I. dan, & Sukartha, M. I. (2016). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Kinerja Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(3), 1727–1754.



DOI: 10.52362/jisamar.v8i4.1609

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

- [2] Ayinde, K., Kuranga, J., & Lukman, A. F. (2015). Modeling Nigerian Government Expenditure, Revenue and Economic Growth: Co-Integration, Error Correction Mechanism and Combined Estimators Analysis Approach. *Asian Economic and Financial Review*, 5(6), 858–867. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr/2015.5.6/102.6.858.867>
- [3] Bilqis, H. K., & Priyono, N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020. *Jurnal Economina*, 2(2), 612–621. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.340>
- [4] Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 4, 305–360. <http://ssrn.com/abstract=94043> Electronic copy available at: <http://ssrn.com/abstract=94043> <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- [5] Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- [6] Astiti, D. N. Y., & Mimba, N. P. S. H. (2016). Pengaruh Belanja Rutin Dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1924–1950.
- [7] Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- [8] Saraswati, D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 8(1), 44–55
- [9] Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., & Pakuan, U. (2022). *Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun 2015-2020 Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun 2015-2020*.
- [10] Rohyana, C., & Abdul Rozak, R. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Belanja Modal Terhadap Kineja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung. *Land Journal*, 3(2), 60–71.
- [11] Ningrat, Cok & Supadmi, Ni. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*. 29. 683. [10.24843/EJA.2019.v29.i02.p15](https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v29.i02.p15).
- [12] Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- [13] Nurul Sukma Handayani. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur. 1–12. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pengertian-keuangan-daerah-7229819c/detail/>
- [14] Atmoko, C. A., & Khairudin, K. (2022). Dampak Pendapatan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 291–296. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1295>
- [15] Digdowiseiso, K., Bambang Subiyanto, & Reza Dwi Cahyanto. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2572–2580. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i6.1150>
- [16] Ghazali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit



DOI: 10.52362/jisamar.v8i4.1609

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Universitas Diponegoro: Semarang

- [17] Ernawati, E., Dirgantari, N., Pramono, H., & Wibowo, H. (2023). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kalimantan Selatan Tahun 2019-2021. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK Dan BI)*, 6(2), 245-256. doi:10.37600/ekbi.v6i2.1178
- [18] Mahadewi, M. A. M., & Indraswarawati, S. A. P. A. (2023). Pengaruh pengukuran pemerintah daerah, belanja modal, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota/kabupaten di provinsi Bali. April, 107–116.
- [19] Anggreni, Ni K. A., and Sri Artini, Luh Gede. "Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, vol. 8, no. 3, 2019, doi:[10.24843/EJMUNUD.2019.v08.i03.p06](https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2019.v08.i03.p06).
- [20] Nadia Febrianty, & Gerry Hamdani Putra. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(2), 30–46. <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v1i2.154>



DOI: 10.52362/jisamar.v8i4.1609

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).